

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGENTAS KEMISKINAN MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) KOTA SURABAYA

Nur Lisya Adinda Febriyanti

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
syalisya32@gmail.com;

Agus Sukristyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
agussukris@untag-sby.ac.id;

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yusufhari@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga yang disebut program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang hanya berfokus pada kelompok Akseptor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Melalui kelompok UPPKA, sekelompok anggota keluarga akseptor terhubung satu sama lain sebagai bagian dari program UPPKA dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga dan mencapai kemandirian ekonomi keluarga. Namun, masih ditemukan kendala dalam penelitian ini seperti memahami karakter masyarakat kurang mampu dan memahami pola pikir bahwa jika pemerintah melakukan intervensi pada masyarakat kurang mampu, pemerintah datang dengan bantuan uang tunai. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman karakter dengan edukasi tentang kegiatan program UPPKA dan menyampaikan kepada kelompok UPPKA bahwa pemerintah datang mengintervensi mereka bukan dengan membawa bantuan dana, tetapi dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan.

Kata kunci: *Program UPPKA, pengentaskan kemiskinan, sosialisasi*

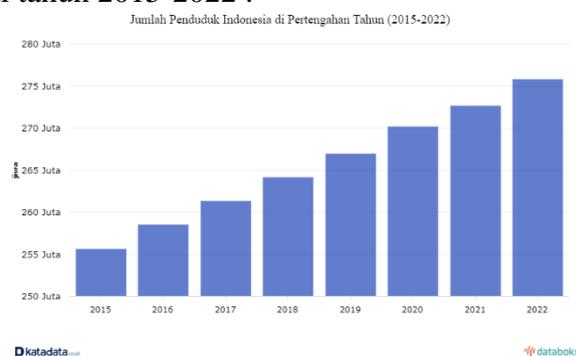
ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the role of the Office of Women's Empowerment and Population Control and Family Planning in alleviating poverty in Surabaya City through family economic empowerment called the Acceptor Family Income Improvement Program (UPPKA) which only focuses on the Acceptor group.. The method used in this research is a qualitative case study. Through the UPPKA group, a group of acceptor family members connect with each other as part of the UPPKA program in order to improve family economic function and achieve family economic independence. However, there are still obstacles in this research such as understanding the character of the underprivileged community and understanding the mindset that if the government intervenes in the underprivileged community, the government comes with cash assistance. Therefore, it is necessary to understand the character by educating about UPPKA program activities and conveying to UPPKA groups that the government comes to intervene with them not by bringing financial assistance, but by providing socialization and training.

Keywords: *UPPKA program, poverty alleviation, socialization*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.. Selama beberapa tahun terakhir, populasi penduduk terus mengalami peningkatan. Terlihat pada grafik di bawah ini, yang menunjukkan populasi penduduk Indonesia di tahun 2015-2022 :



Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 255,58 juta jiwa di pertengahan tahun 2015. Populasi penduduk Indonesia akan terus tumbuh secara signifikan di tahun 2015 hingga tahun 2022. Menurut laporan tersebut, bahwa populasi penduduk Indonesia akan mencapai 275,77 juta pada tahun 2022. Dampaknya pertumbuhan penduduk ini patut diwaspadai dikarenakan efek potensial ledakan penduduk pada kemiskinan ekstrem dan menjadi suatu tantangan untuk pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan (Annur, 2022). Pemerintah harus lebih memperhatikan tentang situasi pertumbuhan jumlah penduduk dan menanganinya dengan baik. Misalnya, bahwa pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di daerah tersebut. Dampak adanya pertumbuhan jumlah penduduk seperti perselisihan sosial sering

muncul dalam situasi di mana sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Belum lagi masalah banyak anak yang putus sekolah karena tingginya biaya pendidikan. Faktor pertambahan jumlah penduduk diakibatkan seperti kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan migrasi penduduk (Rahma et al., 2020).

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani laju pertumbuhan penduduk. Dilihat dari keberhasilan pada program KB dinilai cukup membantu untuk menangani laju pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana (KB) digunakan dengan tujuan merencanakan keluarga kecil. (Ari, 2020). Pemerintah menggunakan program KB adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, mengurangi kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi masyarakat juga perlu memiliki peran dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran (Basyar et al., 2022). Inovasi yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap program keluarga berencana merupakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kota Surabaya merupakan salah satu yang telah memulai pelaksanaan program UPPKA. Di karenakan Kota Surabaya tidak lepas dari kemiskinan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan yang dinilai dari segi biaya.

Secara umum, kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau kelompok tidak dapat menggunakan hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan memajukan kehidupan yang berstatus. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), ditentukan dari temuan survey (*sample*). Angka kemiskinan yang di informasikan oleh BPS adalah data makro dan merupakan hasil Susesnas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang memaparkan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah (Mardikanto, 2019). Menurut BPS, garis kemiskinan mewakili jumlah mata uang paling sedikit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minuman harian untuk makana (setara dengan 2.100 kkal per orang) dan kebutuhan non-pangan.

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk miskin	161.010	154.710	140.810	130.550	145.670
2	Persentase penduduk miskin (%)	5,63	5,39	4,88	4,51	5,02
3	Indeks kedalaman kemiskinan	0,92	1,1	0,81	0,62	0,87
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,25	0,33	0,2	0,15	0,24
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	438.283	474.365	530.178	567.474	592.137

Menurut data BPS Kota Surabaya, presentase individu penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami penyusutan antara tahun 2016 - 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin naik mejadi 145.670 orang pada tahun 2020. Sehingga presentase penduduk miskin menjadi 5,02 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi *covid-19* yang akan mempengaruhi perekonomian dan konsumsi tenaga kerja pada tahun 2020 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021). Dampak sektor ekonomi merupakan masalah penting bagi kehidupan berkeluarga, setiap keluarga

bercita-cita untuk hidup dalam masyarakat yang bahagia dan makmur, tetapi mencapai kesejahteraan ekonomi perlu melakukan program yang harus dijalankan (Wijandi et al., 2018). Program untuk mendorong masyarakat aktif dalam pemberdayaan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mempunyai peranan dalam mengentas kemiskinan di Kota Surabaya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga yang disebut program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang hanya berfokus pada kelompok Akseptor (Wijandi et al., 2018). Program UPPKA merupakan usaha ekonomi produktif yang terdiri dari sekelompok anggota keluarga akseptor yang terhubung satu sama lain dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi keluarga melalui forum kelompok UPPKA (Astuti, 2021). Kelompok UPPKA merupakan kumpulan kegiatan pengembangan keluarga dan ketahanan keluarga berdasarkan tujuan dan motivasi untuk mengisi waktu dan memaksimalkan potensi sosial dan ekonomi keluarga melalui kegiatan pemberdayaan keluarga di bidang sosial dan ekonomi (Nofrijal, 2021).

Selain itu, salah satu kendala yang dihadapi para pelaku usaha mereka adalah pelatih kewirausahaan, pembinaan dan manajemen modal dan pembatasan pemasaran produk. Selama epidemi *covid-19* pembinaan tidak dilakukan, sebagai gantinya para anggota belajar keterampilan satu sama lain (Astuti, 2021). Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mempunyai peran penting dalam mengelola kelompok UPPKA sebagai upaya peningkatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga akseptor dan keluarga rentan usaha ekonomi keluarga. Sejalan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (BKKBN, 2020).

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus, yang berfokus perhatian pada satu objek tertentu dan mendalami sebagai suatu kasus. Teknik studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan perspektif yang komprehensif dan signifikan. Sementara itu, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan sekunder untuk penelitian ini.

Fokus dari penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kota Surabaya” untuk mengetahui (1) penyelenggara pemerintah dalam program UPPKA, (2) Pembinaan Program UPPKA, (3) Pendampingan dan Pemasaran. Lokasi penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggara Pemerintah dalam Program UPPKA

Pada dasarnya penyelenggara penciptaan fungsi pelayanan publik adalah tujuan dari penyelenggara pemerintah. Fungsi pelayanan publik yang baik sering kali merupakan hasil dari pemerintah yang baik. Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak terorganisir dengan baik juga merupakan hasil dari pemerintahan yang tidak terorganisir. Alih-alih terbatas pada penggunaan aturan dan peraturan yang berlaku, konsep tata kelola dibentuk dengan menerapkan prinsip administrasi pemerintahan, yang harus melibatkan birokrasi internal dan birokrasi eksternal (Tahir, 2017).

Program UPPKA di Kota Surabaya merupakan salah satu contoh program pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam program UPPKA sangat diperlukan dalam penyusunan rencana dan pemilihan inisiatif yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Upaya pemerintah untuk memberlakukan program UPPKA dilakukan secara terstruktur, dimulai dari mereka yang menerima program keluarga berencana dengan melihat pendapatan mereka atau jatuh ke dalam kemiskinan ekstreme. Pemerintah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan tujuan meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu perekonomian keluarga dalam rangka mengurangi kemiskinan di keluarga mereka. pengelolaan pengembangan kelompok UPPKA tentu saja bergantung pada keterlibatan pemerintah, lembaga, civitas akademika, dan masyarakat dalam pembinaan dan pengelolaannya. Dapat dilihat peran pemerintah dalam pembinaan kepada masyarakat sebagai :

a. Peran sebagai Entrepeneur

Pemerintah daerah berperan sebagai pengusaha dengan mendorong pertumbuhan usaha kecil melalui kebijakan dan industri kecil. Pemerintah daerah sebagai entrepreneur memiliki peran penting dalam kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun negara. Selain itu, dengan mengerahkan tenaga ahli yang memiliki reputasi dan kompeten dalam menawarkan penyuluhan dan pembinaan bagi pengusaha potensial yang akan menggunakan dana bantuan yang merupakan pinjaman ringan.

Dalam program UPPKA, tanggung jawab pemerintah adalah melatih kelompok UPPKA di Kampung KB. Dimulai di Surabaya, dibuatlah Rumah Kreatif yang menghasilkan pengerajin batik dan menampilkan kelompok UPPKA ini dalam pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk konsumen, DP3APPKB mengundang instansi lain, maupun pegawai DP3APPKB sendiri dan menyarankan kepada para tetangga atau masyarakat lain untuk membeli produk yang dibuat untuk mendukung usaha kelompok UPPKA.

b. Peran sebagai Koordinator

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yakni layanan pemerintah daerah yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan seluruh kegiatan pelayanan pemerintah. Untuk memenuhi peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, perangkat daerah harus memiliki rasa kerja sama dan kerja sama tim. Pada Program UPPKA yang merupakan program peningkatan keluarga akseptor, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai *leading sektor* / penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga sebagai koordinator dari program UPPKA yang mengkoordinasikan kebutuhan program UPPKA dengan instansi lain.

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan regulasi dalam upaya pelaksanaan program UPPKA. Pengertian regulasi menurut Kyle Malcom (2009), yaitu “Regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengertian Regulasi masih dalam prespektif administrasi publik” (Fikriansyah, 2022).

Sejalan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 17 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pengurus kelompok UPPKA di tingkat Kabupaten atau Kota merupakan organisasi perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, hak ini berkaitan dengan usaha ekonomi yang tercakup dalam Undang-undang UMKM, operasi dan perdagangan yang diatur dalam PP No 7 Tahun 2021 mengenai peraturan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM tercantum dalam pasal 39, 60, 71 dan 88.

- a. Pasal 39 tentang kemudahan perizinan berusaha dan mendaftarkan usaha mikro dan kecil;
- b. Pasal 60 tentang penyediaan ruang untuk promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
- c. Pasal 71 tentang kemudahan pendampingan dan fasilitas pembiayaan, dan ;
- d. Pasal 88 tentang untuk usah mikro dan kecil, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem aplikasi.

Pelaksanaan Sosialisasi

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Kerja, 2017). Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti, maka dinalisis sesuai dengan teori Peran Seorjono Soekanto (2002:243), yaitu “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Dan selaras dengan Peran Pemerintah yang dikemukakan oleh Sindang P. Siagian dalam bukunya Administrasi pembangunan (2009:132), yaitu “peranan pemerintah pada umumnya muncul sebagai bentuk seperti fungsi, pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegak hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.” Sesuai dengan pengertian dari 2 teori tersebut, fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan UPPKA dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat menjadi pelaku usaha.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan UPPKA untuk memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat menjadi pelaku usaha. Kegiatan pembinaan UPPKA ini dilaksanakan dengan target peserta keluarga yang ikut Akseptor KB yang tersebar di beberapa RW dalam lingkup Kelurahan Kandangan setelah melalui tahap *assegment* untuk menentukan peserta yang bisa mengikuti agenda pelatihan dalam kurunwaktu Bulan Juni-Juli 2022. Pembinaan dilakukan selama 13-17 pertemuan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan, sisanya dalam satu tahun adalah evaluasi atau pendampingan untuk memantau progress kelompok UPPKA. Dalam melaksanakan pembinaan pada kelompok UPPKA, masyarakat menerima dengan positif terhadap kegiatan yang daidakan oleh pemerintah.

Program UPPKA dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya untuk memfasilitasi sebagai salah satu bentuk program pemerintah kepada masyarakat, salah satunya untuk mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan individu yang sebelumnya tidak memiliki usaha kemudian dilatihkan untuk memiliki usaha sendiri. Dengan cara ini, masyarakat dapat meningkatkan perekonomian di keluarganya. Para ibu rumah tangga bisa berkontribusi di dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhannya.

Tujuan kegiatan UPPKA di Kecamatan Benowo ini dinilai berhasil dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam meningkatkan pendapatannya. Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Benowo adalah rumah kreatif sebagai tempat pelatihan kewirausahaan. Rumah kreatif ini pun tidak fokus di Kecamatan Benowo saja, tetapi sudah banyak Kecamatan yang tersedia rumah kreatif.

Adapun faktor kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan kelompok UPPKA dan solusi untuk permasalahan kendala yang dihadapi.

Berikut faktor kendala program UPPKA :

- a. Kendala yang dihadapi adalah tantangan yang mendasar tentang pemahaman karakter dari masyarakat yang kurang mampu atau kurang sejahtera.
- b. Kendala tentang pemahaman atau *mindset* bahwa bila pemerintah mengintervensi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah datang dengan memberikan bantuan secara *cash* atau tunai.

Adapun solusi yang diberikan terhadap kendala yang dihadapi, sebagai berikut:

- a. Solusi yang dilakukan tentang pemahaman karakter ini diberi edukasi tentang manfaatnya mengikuti kegiatan program UPPKA agar mereka lebih produktif dan menghasilkan produk makanan atau makanan yang bisa membantu perekonomian keluarga mereka.
- b. Solusi untuk mengubah *mindset* tentang pemberian bantuan dalam bentuk *cash* atau tunai dengan menyampaikan kepada kelompok UPPKA bahwa pemerintah datang mengintervensi mereka bukan dengan menyampaikan bantuan secara tunai saja, tetapi dengan memberikan edukasi dan pelatihan.

Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan menurut Mitha Thoha menyatakan bahwa “Pembinaan ialah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan, yaitu : (1) Pembinaan bisa berupa suatu, tindakan, prses atau pernyataan tujuan. (2) Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Zamrodah, 2016).

Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan dan pameran pemasaran kepada kelompok UPPKA yaitu dengan melakukan kunjungan atau *home visit* untuk memberikan dorongan motivasi serta memfasilitasi dalam hal akses manajemen, pemasaran, packing legalitas dan inovasi produk. Sesuai dengan memberikan pendampingan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sudah memenuhi indikator sebagai pendamping karena telah :

- a. Pada kegiatan kelompok UPPKA prioritas utama adalah mengikuti pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan taraf pendapatan keluarga akseptor, dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga mereka. selain itu mengikuti pelatihan dan pendampingan dapat membantu kelompok UPPKA untuk mendirikan dan meningkatkan usaha yang dijalankan.
- b. Mendapatkan fasilitas tentang informasi atau kuota tentang bazar di tingkat kota atau tingkat provinsi. Jadi kelompok UPPKAn ini dilibatkan dengan membukakan meja untuk mereka supa usaha mereka tetap berjalan. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas tersendiri bagi pelaku UPPKA yaitu bila mengadakan rapat atau kegiatan diharuskan untuk membeli di UMKM binaan Kota Surabaya. Salah satunya kelompok UPPKA yang sudah terdaftar di E-peken yang sudah digagas oleh pemerintah Kota Surabaya.
- c. Masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan program UPPKA ini yaitu banyak pengetahuan, pemasaran, packing dan mereka bisa mengembangkan sayap di dalam usaha mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai pengalaman tentang membuat makanan atau minuman dengan berbagai variasi yang nantinya mereka akan jual sebagai usaha mereka.
- d. Pemerintah Kota Surabaya dalam usaha memajukan pendapatan keluarga sejahtera dengan usaha ekonomi keluarga. Dalam melaksanakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, kegiatan program UPPKA berupa pelaksanaan intervensi pelatihan bagi keluarga kurang sejahtera atau kurang mampu yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan minat dan skill mereka.

Pelatihan menurut Edwin B. Flippo dalam Sri Larasati (2018:11), menyatakan “Pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan *knowlede* dan *skill* seseorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu” (Milah, 2020) Oleh karena itu, kegiatan utama dari kegiatan UPPKA ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk memilih pelatihan berdasarkan minat dan bakat mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kesadaran mereka akan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Masyarakat dalam hal

pelatihan ini menerima positif terhadap pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, seperti banyak kelompok yang menghasilkan produk dengan brandingnya masing-masing dan sudah banyak dijual di platform seperti instagram, whatsapp maupun di daftarkan melalui E-peken. Pemerintah Kota Surabaya sudah memenuhi dalam melakukan pelatihan pada kelompok UPPKA. pelatihan ini bisa menjadi wadah bagi kelompok UPPKA untuk bisa berkembang melalui pelatihan kelompok UPPKA di Kecamatan Benowo.

Pemerintah Kota Surabaya mengenai indikator keberhasilan program UPPKA ini merupakan ukuran atau patokan dalam menentukan berhasil atau tidaknya program yang telah dibuat. Bahwa dalam menjalankan program UPPKA tingkat keberhasilan mempunyai banyak faktor yang menjadi penentu dalam menilai keberhasilan program UPPKA, yaitu :

- a. Tingkat keberhasilan program UPPKA bila dilihat dari segi kehadiran pada waktu pelatihan. Pada waktu pelatihan, pemerintah mengupayakan tingkat keberhasilan kehadiran bisa 100% mulai dari awal sosialisasi diadakan sampai dengan akhir kegiatan yaitu mengadakan bazaar atau pameran. Untuk terkait hasil, kembali lagi kepada peserta kelompok UPPKA, meskipun pada dasarnya setelah diadakan pembinaan ada sistem pendampingan.
- b. Keberhasilan program dari Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan kelompok UPPKA dengan menjemput atau memberikan fasilitas dengan kendaraan dinas dan menyediakan meja atau tempat bila diadakan bazar.

Bila dilihat dari tingkat keberhasilan pada program UPPKA, sudah bisa dikatakan cukup efektif bagi akseptor KB. Karena program UPPKA ini berjalan cukup lama dan juga masuk dalam indikator kinerja pemerintah. Selain dinilai dari tingkat keberhasilan program UPPKA, adapula dampak program UPPKA ini bagi kelompok masyarakat yaitu:

- a. Dampak dari program UPPKA ini sangat membantu, dikarenakan masyarakat mempunyai kegiatan dirumah selain menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Selain itu setiap individu dari kelompok UPPKA bisa mengembangkan diri dengan program UPPKA yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- b. Menambah pengetahuan dan menambah perekonomian di dalam keluarganya, dikarenakan produk yang mereka hasilkan juga dibantu jual dan promosi oleh pemerintah. Selain itu dibantu oleh Dinas untuk produknya di daftar pada E-peken.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan dan informasi yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, serta menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasarkan fokus penelitian, peran pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan program UPPKA sebagai (1) Penyelenggara Pemerintah dalam Program UPPKA, (2) Pembinaan Program UPPKA, dan (3) Pendampingan dan Pemasaran Program UPPKA. Peneliti menggunakan peran

Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Sebagai acuan untuk menganalisis peran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dalam Program UPPKA.

Melalui program UPPKA yang berfokus pada kelompok akseptor KB, Pemerintah Kota Surabaya berperan untuk mengurangi kemiskinan Kota Surabaya. Peneliti menyimpulkan bahwa mengenali sifat masyarakat miskin dan memiliki mentalitas yang tepat saat memberikan bantuan uang yang disediakan pemerintah kepada masyarakat adalah masalah utama dalam kegiatan program UPPKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, cindy mutia. (2022). *Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>
- Ari, W. (2020). *KB, Salah Satu Usaha Pemerintah untuk Menekan Tingkat Pertumbuhan Penduduk*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/11/141500569/kb-salah-satu-usaha-pemerintah-untuk-menekan-tingkat-pertumbuhan-penduduk?page=all>
- Astuti, T. E. (2021). *Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Sejahtera Melalui Usaha Ekonomi Keluarga Di Kelompok UPPKA Maju Bersama Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Basyar, M. R., Puspaningtyas, A., & Bella, V. S. (2022). *Evaluation of the village development index as an effort to provide the right policy intervention*. 4(2), 209–218. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.18826>
- BKKBN. (2020). *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor*. 29.
- Fikriansyah, I. (2022). *Regulasi Adalah: Bentuk, Jenis, dan Tujuannya*. Detikjabar.
- Kerja, E. P. T. (2017). *Sosialisasi*. *Nal Edition*, 6(11), 951–952. *Angewandte Chemie Internatio*, 13(April), 15–38.
- Mardikanto. (2019). *Panduan pelaksanaan gerakan satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa lebih sejahtera -*. *Jurnal Ekonomi*, 6–10. <https://silap-online.kesra.jatengprov.go.id/data/download/5>
- Milah, A. A. R. S. (2020). *Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap Semangat Kerja*. *Repository Universitas Siliwangi*, 1–152.
- Nofrijal, H. M. (2021). *“UPPKA sebagai Pemberdayaan Keluarga membentuk Usaha-Mikro.”* Gemari.Id. <https://gemari.id/gemari/2021/8/10/8cix6rd792ddpu92effblgnoodktnk>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan*

- Jangka Menengah Daerah (RPJMD). *Rpjmd 2021-2026*, 1–407.
<https://bappeko.surabaya.go.id/images/File Upload/Rankhir RPJMD 2021-2026.pdf>
- Rahma, A., Pariska, E., F.M, O., Indah, S., Violena, & Yunita. (2020). *Pengaruh dan Dampak yang Ditimbulkan oleh Keseimbangan Penduduk terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*.
- Tahir, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual*. 978–979.
- Wijandi, S., Uppks, S., Pekon, D. I., Kecamatan, W., Timur-depok, D. I. B., Syahza, A., Latifa, T., Keluarga, K., Teknik, F., Padang, U. N., Ii, B. A. B., Hutomo, M. Y., Hidayati, N., Studi, P., Informasi, S., Bina, U., Informatika, S., DIKA AMIR PRATAMA, W., Teknologi, B., ... S., F. P. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Di Pekon Wates Kecamatan Balik. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 3(1), 10–17.
- Zamrodah, Y. (2016). *Pembinaan Keislaman*. 15(2), 1–23.